

PENGARUH PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAROS

Arman^{*1}, Abdullah², Saripuddin D³

^{*1}Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: ^{*1}armanarif942@gmail.com, ²abdullah@stienobel-indonesia.ac.id, ³saripuddinlagu79@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kinerja dan menganalisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja infrastruktur daerah di Kabupaten Maros. (2) variabel apa saja yang paling besar pengaruhnya terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja terhadap belanja infrastruktur daerah di Kabupaten Maros.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei dengan teknik analisis korelasional untuk mengetahui pengaruh hubungan variabel terikat terhadap variabel bebas. Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Kabupaten Maros. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian adalah 1 bulan yaitu pada bulan April sampai dengan Mei 2023. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Maros yang berjumlah 76 orang dengan menggunakan pendekatan sensus karena seluruh populasi dijadikan sampel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Variabel interaksi berpengaruh signifikan terhadap belanja infrastruktur di Kabupaten Maros. (2) Pengaruh belanja daerah terhadap pembangunan infrastruktur, karena t-hitungnya adalah 2,132 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,682. dan sig $\alpha = 0,05 < 0,01$ yang berarti variabel interaksi berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur dengan signifikansi 0,000.

Kata Kunci: Interaksi, Budaya Kerja, Lingkungan Kerja dan Kinerja Pegawai.

ABSTRACT

This research aims to determine (1) The performance and analysis of the management of regional infrastructure revenue and expenditure budgets in Maros Regency. (2) Variables that have the most influence on the management of revenue and expenditure budgets on regional infrastructure spending in Maros Regency.

The type of research used is quantitative research using survey methods with correlational analysis techniques to determine the influence of the relationship between the dependent variable and the independent variable. This research was conducted at the Maros Regency Inspectorate. The time required for the research is 1 month, namely from April to May 2023. The population and sample in this research are all employees of the Regional Inspectorate of Maros Regency, totaling 76 people using a census approach because the entire population is used as a sample.

The research results show that (1) The interaction variable has a significant influence on infrastructure spending in Maros Regency. (2) The influence of regional spending on infrastructure development, because the t-count is 2.132 which is greater than the t-table of 1.682. and sig $\alpha = 0.05 < 0.01$, which means that the interaction variable influences infrastructure development with a significance of 0.000.

Keywords: Interaction, Work Culture, Work Environment and Employee Performance.

PENDAHULUAN

Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah diantaranya Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah sah., seperti di atur dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6. Namun dalam prinsip kebijakan perimbangan keuangan dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 2 dijelaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan pemerintah Daerah. Pemerintah pusat juga bertugas untuk menjaga stabilitas dan

keseimbangan fiskal di daerah, untuk itu Pemerintah Pusat memberikan Dana Perimbangan.

Maksud dan tujuan Undang-Undang diatas tersebut tidak sekedar pelimpahan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih mendasar adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Disamping itu, dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya juga memudahkan pengukuran tentang sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.

Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari berbagai sektor seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba dan pendapatan lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah Adalah uang yang diterima oleh suatu daerah dari sumber-sumber daerah di dalam yurisdiksinya sendiri, sesuai dengan norma-norma daerah atau peraturan perundang-undangan yang sesuai, untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat diukur dengan melihat sektor pendapatan daerah Carunia, 2017.

Faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari suatu negara atau masyarakat yaitu pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap positif dalam merangsang. Menurut Kuncoro Dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak daerah kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini di mana porsi antara Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan bantuan pusat sangat menjolok sekali bahwa lebih separuh dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Daerah) yang sangat minim dalam membiayai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu di bawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan. Jadi PDRB adalah nilai tambah yang pengukurannya berdasarkan adanya aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Data PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumberdaya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah,

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak daerah kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini di mana porsi antara Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan bantuan pusat sangat menjolok sekali bahwa lebih separuh dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah bermuara pada Pendapatan Dan Belanja Daerah yang sangat minim dalam membiayai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu di bawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan.

Diharapkan dengan adanya otonomi daerah dapat memberikan manfaat agar tiap-tiap daerah bisa membiayai kehidupan daerahnya dengan perolehan hasil daerah baik

berupa retribusi, pajak pendapatan, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain. Atas dasar pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembangunan daerah adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup keseluruhan daerah sebagai suatu kesatuan wilayah kehidupan maupun kehidupan setiap individu anggota masyarakat karena pelaksanaan pembangunan nasional berada didaerah, maka rencana pembangunan daerah merupakan bagian dari kerangka umum pola pembangunan nasional dan daerah haruslah saling menunjang. Tingkat Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum atau terus menerus.

Kenaikan harga meliputi semua barang dan proses kenaikan secara berkesinambungan. Kenaikan harga berlangsung cukup lama dan terus menerus. Inflasi juga dapat memperburuk kesejahteraan masyarakat akibat menurunnya daya beli masyarakat secara umum akibat harga- harga naik Selain itu distribusi pendapatan pun semakin buruk akibat tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan inflasi yang terjadi. Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) selaku Entitas Akuntansi dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan. Disamping itu, Laporan Keuangan SKPD juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, dan untuk menilaikinerja SKPD, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Kuangan SKPD secara umum mempunyai tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepada SKPD, antara lain : Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.,mMenyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang telah dicapai.nMenyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan SKPD dalam membiayai aktivitasnya.

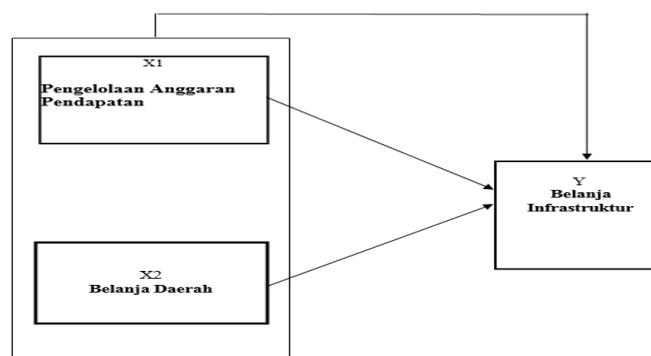
Dengan demikian pengaruh nya terhadap Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah semakin lancar masyarakat taat berkontribusi, maka semakin banyak pula uang yang di belanjakan di daerah dari hasil pajak tersebut, dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari dari pajak maupun wisata serta hiburan, maka akan memperbesar pendapatan dari beberapa sektor suatu daerah. Berdasarkan uraian di atas terkait dengan faktor- faktor yang mempengaruhi Pendapatan Dan Belanja Daerah, antara lain : Setiap daerah baik Kabupaten maupun Kota di Indonesia memiliki sumber pendapatan utamanya yang berupa pajak dan retribusi daerah di samping pendapatan lain yang diperoleh oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah dijadikan dasar kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan urusan pemerintahannya, sehingga dari proyeksi besaran PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang diterima pada tahun tersebut dapat diperoleh fiscal gap sebagai dasar pemberian dana perimbangan. Biasanya, Pemerintah Daerah akan sangat berhati-hati dalam membelanjakan dana yang berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Tambunan (2006) menyatakan jika PAD (Pendapatan Asli Daerah) meningkat, maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan kemandirian daerah akan meningkat, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan membiayai pembangunan. Tetapi penerimaan daerah dari unsur PAD (Pendapatan Asli Daerah) saja masih belum mampu memenuhi kebutuhan daerah, apalagi dengan penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah. Oleh karena itu, daerah masih tetap membutuhkan bantuan atau dana yang berasal dari pusat, di mana bantuan ini disebut dana perimbangan DAU (Dana Alokasi Umum). Sumber pembiayaan pemerintah daerah untuk perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan salah satunya atas dasar adanya desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan yaitu dengan cara pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud dari desentralisasi yaitu dengan pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.

Sampe sekarang penyusunan APBD masih dilakukan berdasarkan pertimbangan *incremental budget* maka sering mengabaikan kinerja keuangan di APBD. Anggaran pendapatan seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin didapat agar pada tahap laporan realisasi dapat anggaran diharapkan realisasi pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, sedangkan belanja memiliki sifat yang relatif mudah dilakukan dan rentan terjadinya inefisiensi dan kebocoran sehingga mungkin anggaran belanja dibuat jauh lebih besar dari suatu potensi realisasi belanja yang sebenarnya. Penggunaan analisis kinerja keuangan digunakan sebagai alat alat keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang sifatnya komersial sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih terbatas. Maka dari itu, perlu suatu perubahan yang mengacu pada penggunaan analisis kinerja keuangandalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. walaupun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat tinggi. Sedangkan kinerja keuangan belanja daerah juga sudah baik tetapi belum terjadi keseimbangan antara belanja modal.

Berdasarkan Merujuk pada transparansi bahwa pemerintah harus terbuka dalam menyediakan dan memberikan akses informasi kepada masyarakat dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Merujuk pada akuntabilitas bahwa fenomena Pengelolaan Anggaran Pendapatan daerah daerah pemerintah Kabupaten Maros dapat dilihat dari pelembagaan pengadaan barang dan jasa. Maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang analisis Pendapatan Dan Belanja Daerah kota Maros dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah berjudul **“Pengaruh Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maros”**

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka konsep yang telah diuraikan, maka disusun hipotesis sebagai berikut :

1. Didudaga Pengelolaan Anggaran Pendapatan daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pembelajaran Infrastruktur
2. Didudaga Belanja Daerah Kabupaten Maros secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pembelajaran Infrastruktur
3. Didudaga Pengelolaan Anggaran Pendapatan daerah Dan Belanja Daerah Kabupaten Maros secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Pembelajaran Infrastruktur
4. Didudaga Pengelolaan Anggaran pendapatan Kabupaten Maros berpengaruh dominan terhadap Pembelajaran Infrastruktur.

METODE PENELITIAN

Pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2014) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Inspektorat kabupaten Maros dan dilaksanakan pada bulan April - Mei 2023. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan berdasarkan populasi, dengan cara menggunakan Non-probability Sampling atau (sanpel jenuh) dengan metode survei. Berdasarkan perhitungan dari purposive sampling atau sanpel jenuh dengan jumlah responden seluruh pegawai, maka peneliti menggunakan sampel sebanyak 76 orang pegawai PNS Kantor Daerah kabupaten Maros.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan angket/kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang didahului dengan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis melalui uji t dan uji f serta koefisien determinasi (R square).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2014), korelasi bivariate pearson adalah korelasi yang dilakukan terhadap masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pernyataan yang berkorelasi signifikan dengan skot total menunjukkan item tersebut valid. Jika rhitung > rtabel (uji dua sisi dengan sig.0,05) maka instrumen atau item pernyataan dinyatakan valid terhadap skor total. Hasil uji validitas yang penulis lakukan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	rhitung	rtabel	Keterangan
Pengelolaan Anggaran Pendapatan	1	0,494	0,254	Valid
	2	0,517	0,254	Valid
	3	0,624	0,254	Valid
	4	0,447	0,254	Valid
	5	0,605	0,254	Valid
	6	0,559	0,254	Valid
	1	0,566	0,254	Valid
	2	0,602	0,254	Valid

Variabel	Item	rhitung	rtabel	Keterangan
Belanja Daerah	3	0,602	0,254	Valid
	4	0,517	0,254	Valid
	5	0,500	0,254	Valid
	6	0,474	0,254	Valid
Pembelajaan daerah	1	0,661	0,254	Valid
	2	0,690	0,254	Valid
	3	0,725	0,254	Valid
	4	0,639	0,254	Valid
	5	0,539	0,254	Valid
	6	0,528	0,254	Valid

Sumber : Data Primer Diolah 2023

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dengan concistency dimana data yang diperoleh dengan menggunakan Cronbach's Alpha. Konsep reliabilitas menurut pendekatan ini adalah konsistensi antara item-item dalam suatu instrumen. Tingkat keterkaitan antar item pernyataan dalam suatu instrumen untuk mengukur Variabel tertentu menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi instrumen yang bersangkutan. Dari hasil pengolahan data, nilai alpha masing-masing Variabel dapat dilihat pada Tabel 2. sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Nama Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Pengelolaan Anggaran Pendapatan (X1)	0,510	Reliabel
Belanja Daerah (X2)	0,520	Reliabel
Pembelajaan Infrastruktur (Y)	0,685	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah 2023

Hasil pengolahan data melalui program analisa data SPSS ver. 26 maka dapat dilihat nilai *Alpha Cronbach* masing-masing variabel yang meliputi Pengelolaan Anggaran Pendapatan, Belanja daerah dan Lingkungan Kerja Pegawai mempunyai nilai masing-masing variabel lebih besar dari 0,50 yang dapat diartikan masing-masing variabel yang ada dapat dikatakan memenuhi persyaratan atau variabel tersebut bisa dikatakan reliabel.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dengan menggunakan alat bantu program analisa data SPSS Ver. 26 maka diperoleh nilai koefisien regresi masing-masing variabel yang meliputi pengelolaan, Belaja terhadap pebelajaan Infrastruktur dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.063	2.470		1.645	.104	-.860	8.985					
	X1	.564	.132	.517	4.258	.000	.300	.828	.713	.446	.339	.429	2.331
	X2	.292	.137	.259	2.132	.036	.019	.565	.650	.242	.170	.429	2.331

Berdasarkan hasil print out SPSS diperoleh koefisien dalam perhitungan regresi di atas, maka persamaan regresinya menjadi :

$$Y = 4.063 + 0,546X_1 + 0,292X_2$$

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Formulasi regresi linear berganda di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 4.063 mempunyai pengertian bahwa jika skor yang meliputi Pengelolaan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah nilainya tetap/konstan maka pembelajaran daerah kabupaten Maros mempunyai nilai sebesar. 4.063
2. Nilai Koefisien Regresi Variabel X1 (Pengelolaan Anggaran) sebesar 0,564 berarti bahwa setiap peningkatan 1 satuan variabel X1 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dengan asumsi X2 tetap maka akan meningkatkan belanja Infrastruktur sebesar 0,564.
3. Nilai koefisien regresi variabel X2 (Belanja Daerah) sebesar 0, 292 berarti bahwa setiap peningkatan 1 satuan variabel X2 Belanja Daerah dengan asumsi X2 tetap maka akan meningkatkan Kinerja Pegawai sebesar 0,292.

Uji t (Secara Parsial)

Berdasarkan tabel 3 diatas, maka dapat dideskripsikan pengujian secara parsial sebagai berikut :

1. Pengaruh Pengelolaan Anggaran Pendapatan (X1) terhadap Pembelajaran Daerah (Y) di daerah Kabupaten Maros. diketahui nilai thitung variabel Pengelolaan Anggaran Pendapatan sebesar 4.258 dengan tingkat signifikan sebesar 0,00. Dalam penelitian ini tingkat signifikan yang digunakan $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas $(n-k-1) = (76-2- 1) = 74$. yang ditentukan t tabel sebesar 1,682. Dengan demikian karena thitung sebesar 4.258. lebih besar dibandingkan dengan ttabel sebesar 1,682 dan sig $\alpha = 0,05 < 0,00$ yang berarti variabel Pengelolaan Anggaran Pendapatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja infrastruktur daerah kabupaten Maros.
2. Pengaruh Belanja Daerah (X2) terhadap Pembelajaran Infrastruktur Daerah (Y). Di Daerah Kabupaten maros Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat uji SPSS ver. 26 diketahui bahwa nilai thitung variabel Belanja daerah sebesar 2.132 dengan tingkat signifikan sebesar 0,01. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas $(n-k-1) = 74$ yang ditentukan ttabel sebesar 1,682. Oleh karena thitung sebesar 2.132 lebih besar dibandingkan dengan ttabel sebesar 1,682 dan sig $\alpha = 0,05 < 0,00$ yang berarti variabel Belanja daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pembelajaran Infrastruktur Daerah Kabupaten Maros.

Uji F (Secara Simultan)

Tabel 4. Hasil Uji F (Secara Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	154.081	2	77.040	42.416	.000 ^b
	Residual	132.590	73	1.816		
	Total	286.671	75			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS ver. 26 sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut: Berdasarkan hasil analisa data SPSS diketahui F_{hitung} sebesar 42.416 dengan signifikan 0,000. Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah = 0,005 atau dengan interval keyakinan sebesar 95% dengan $df (n-k-1) = 74$ dan ditentukan nilai $F_{tabel} = 2,83$. Oleh karena nilai F_{hitung} sebesar 42.416 berarti variabel bebas/independen (X) yang meliputi Pengelolaan Anggaran Pendapatan, Belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai di Daerah kabupaten Maros, karena dari pengujian menunjukkan bahwa hasil $F_{hitung} = 45.551$ lebih besar dari $F_{tabel} = 2,83$. Jadi kesimpulannya hipotesis yang menjawab ada pengaruh Pengelolaan Anggaran Pendapatan, Belanja daerah secara simultan terhadap Kinerja Pegawai di Daerah kabupaten Maros dapat diterima.

Uji Beta (Secara Dominan)

Tabel 5. Hasil Uji Beta

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.063	2.470		1.645	.104
	X1	.564	.132	.517	4.258	.000
	X2	.292	.137	.259	2.132	.036

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan hasil nilai beta standardized diketahui bahwa variabel yang meliputi Pengelolaan Anggaran Pendapatan, Belanja daerah terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah maka yang mempunyai pengaruh yang paling besar adalah Pengelolaan Anggaran Pendapatan adalah variabel Pengelolaan Anggaran Pendapatan (X1) yaitu 0, 517.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6. Hasil uji determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson
						F Change	df1	df2		
1	.733 ^a	.537	.525	1.348	.537	42.416	2	73	.000	2.287

a. Predictors: (Constant), X2, X1
 b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Diolah, 2023

Nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,537 yang dapat diartikan bahwa variabel bebas/independen (X) yang meliputi Pengelolaan Anggaran Pendapatan, Belanja daerah dan mempunyai kontribusi terhadap pembelajaran daerah di daerah kabupaten Maros sebesar 53.7%, sedangkan sisanya sebesar 47.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengelolaan Anggaran Pendapatan Pada Pembelajaran Infastruktur

Berdasarkan hasil olahan Data SPSS vers. 26 Pengaruh Pengelolaan Anggaran Pendapatan terdapat thitung sebesar 4258 lebih besar dibandingkan dengan ttabel sebesar 1,682 yang berarti variabel Pengaruh Pengelolaan Anggaran Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Pembelajaran Infastruktur. Pengaruh Pengelolaan Anggaran Pendapatan pula mempunyai nilai sebesar 568 artinya pengaruhnya sangat signifikan terhadap Pembelajaran Infastruktur di bandingkan belanja daerah.

Hal ini terjadi disebabkan karena adanya dua konteks, yaitu Pengelolaan Anggaran Pendapatan yang terjadi di dalam kebutuhan organisasi dan Publik berjalan baik dan normal sebagaimana yang terlihat pada hasil hipotesis dan juga terlihat sangat jelas dengan validitas daya yang menunjukkan semua item indikator variabel dengan menjawab setuju dan sangat setuju ditambah dengan kehandalan data yang bisa diyakininya berdistribusi secara normal dan merata. Hasil penelitian ini menunjukkan hal yang baik dan dapat ditingkatkan kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan pada kabupaten Maros, sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahyuniar Tahun 2017. Setelah melakukan analisis, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros secara umum dikatakan baik. Hal ini di buktikan (a) Pendapatan Daerah rata- rata 100%, (b) Pertumbuhan Pendapatan Daerah rata- rata positif 52.92%, (c) Rasio Keuangan Pendapatan Daerah di lihat dari Derajat Desentralisasi menunjukkan rata- rata 5,17% (rendah), rasio Ketergantungan Keuangan Relatif tinggi rata- rata 77,31%, Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah secara umum rasio efektifitas rata- rata 113.45% dan rasio efisiensi rata- rata di atas 10%, (d) Derajat Kontribusi BUMD mencapai angka rata- rata 0.4%. (2) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Maros secara umum dapat di katakan baik . hal ini di buktikan (a) Belanja Daerah rata- rata di bawah 100%, (b) Pertumbuhan Belanja Daerah mengalami perumbuhan rata- rata 16.10%, dan (c) Rasio Keserasian Belanja Daerah di lihat dari Rasio Belanja Operasi menunjukkan rata-rata 76.95%, Rasio Belanja Modal rata-rata 19.64% (d) Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan rata- rata di bawah 100%.

Pengaruh Belanja Daerah pada Pembelajaran Infastruktur

Berdasarkan hasil olahan Data SPSS vers. 26 Pengaruh Pengelolaan Anggaran Pendapatan terdapat thitung sebesar 2132 lebih besar dibandingkan dengan ttabel sebesar 1,682 yang berarti variabel Pengaruh belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap Pembelajaran Infastruktur. Pengaruh belanja daerah pula mempunyai nilai sebesar 292 artinya pengaruhnya sangat signifikan terhadap pembelajaran infastruktur di kabupaten maros.

Hal ini terjadi disebabkan karena adanya dua konteks, yaitu Pengelolaan Anggaran Pendapatan yang terjadi di dalam kebutuhan organisasi dan Publik berjalan baik dan normal sebagaimana yang terlihat pada hasil hipotesis dan juga terlihat sangat t jelas dengan validitas daya yang menunjukkan semua item indikator variabel dengan menjawab setuju dan sangat setuju ditambah dengan kehandalan data yang bisa diyakininya

berdistribusi secara normal dan merata. Sama seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Darsono Fak. Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik Tahun 2005 dengan judul “ Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Efisiensi Anggaran Belanja Negara Rutin pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan kabupaten Pamekasan.

Hasil penelitian menunjukkan tren positif dalam melakukan belanja dengan hal efektif dan efisien berdasarkan kebutuhan publik sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan keuangan publik yang berbasis pada kebijakan belanja untuk kebutuhan publik misalnya Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah disusun dengan berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan belanja daerah pada tahun 2016 (APBD murni) disusun dengan memperhatikan ketentuan.

Oleh karena itu hasil penelitian yang dilaksanakan selama 2 bulan ini menemukan hasil yang memberikan dampak positif variabel belanja daerah terhadap pembelanjaan infrastruktur daerah dan tentu berjalan dengan sistematis yang sesuai ketentuan Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik.

Pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 menyatakan bahwa APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut: Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, Efisiensi dan Efektifitas Anggaran dan Taat Asas.

Pengaruh pengelolaan Anggaran, Belanja Daerah Secara Simultan terhadap Pembelanjaan Infrastruktur

Berdasarkan Analisis data pada hasil Hipotesis bahwa nilai Fhitung sebesar 42.416, berarti variabel bebas/independen (X) yang meliputi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah terhadap pembelanjaan infrastruktur berpengaruh signifikan karena dari pengujian menunjukkan bahwa hasil Fhitung = 42.416 lebih besar dari F tabel = 2,83 atau bisa dikatakan Ho ditolak dan Ha diterima.

Nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0.537 yang dapat diartikan bahwa variabel bebas/independen (X) yang meliputi Pengelolaan Anggaran Pendapatan, Belanja daerah dan pembelanjaan Infrastruktur sebesar 0.537%, sedangkan sisanya sebesar 27.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Artinya penelitian ini menunjukkan sebaran data yang valid dan keyakinan yang hadal menunjukkan penelitian dapat dilanjutkan atau dikembangkan berdasarkan indikator yang lain sesuai dengan kepenikan organisasi.,

Penelitian ini juga Autokorelasi yang merupakan suatu keadaan dimana variabel pengganggu pada periode yang lain menentukan pengujian autokorelasi berdasarkan nilai Durbin-Watson Kesimpulan tidak terdapat autokorelasi, selanjutnya adalah Sebagaimana terlihat Uji multikolinearitas berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidak adanya gejala multikolinearitas dengan menggunakan besaran nilai VIF (Variance Inflation Factor) yang diolah menggunakan alat bantu program analisa data dimana nilai VIF dari masing-

masing variabel bebas mempunyai nilai diantara 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh). Yang artinya penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.

Hasil penelitian senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Christin Marciah Poyoh (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendapatan belanja keuangan daerah dikarenakan belanja keuangan daerah belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri dan masih terergantung pada pemerintah pusat. Pihak-pihak lain penelitian dilakukan oleh Bahrun Assidiqi menunjukkan bahwa kinerja hasil pendapatan keuangan daerah secara umum sudah baik.

Zalmi (2014) Analisis kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah kabupaten Pasaman Barat tahun 2007-2012, Metode analisis yang digunakan adalah analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema budaya, Hasil penelitian didapatkan kinerja keuangan daerah dilihat dari pendapatan asli daerah (PAD) selaluterjadi peningkatan pendapatan setiap tahunnya. Itu artinya nampak dengan jelas bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah berdampak pada kepentingan publik seperti yang tercantu pada jaaban responden 21 dimana Penggunaan anggaran berdasarkan Program kerja dilaksanakan secara maksimal dan berdampak pada kepentingan publik.

Pengaruh Pengelolaan Anggaran, variable paling dominan terhadap Pembelajaran Infrastruktur

Berdasarkan Analisis data pada hasil Hipotesis bahwa nilai Fhitung sebesar 42.416, berarti variabel bebas/independen (X) yang meliputi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah terhadap pembelajaran daerah bisa dikatakan besar pengaruhnya adalah X1 pengelolaah Anggara dilihat dari uji Beta sebesar 517 dibanding nilai pengaruh beta variabel X2 belanja daerah 259 artinya bahawa pengeloaan anggaran lebih besar pengaruhnya dari pada belanja daerah, itu terbukti dengan jawabana responden rata 2 menjawab sangat setuju yang menyatakan Pengelolaan disusun di OPD harus menggunakan berbasis keahlian, ditambah lagi dengan pernyataan responden Pengelolaan Anggaran Pendapatan daerah daerah harus sepenuhnya dapat dilakukan tepat waktu, yang juga menyatakan sangat setuju menjawab diatas rata atau mayoritas. Nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,537 yang dapat diartikan bahwa variabel bebas/independen (X) yang meliputi Pengelolaan Anggaran Pendapatan, Belanja daerah dan mempunyai kontribusi terhadap pembelajaran daerah di daerah kabupaten Maros sebesar 53.7%, sedangkan sisanya sebesar 47.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini memenuhi unsur ilmiah karea berdasar uraiiah hasil dan pembahasan diatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan peneliti terhadap 76 responden dari pegawai kantor Inspektorat kabupaten Maros, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembelajaran infrastruktur.
2. Belanja Daerah Kabupaten Maros secara parsial berpengaruh positif terhadap alokasi belanja Infrastruktur.
3. Pengelolaan Anggaran Pendapatan daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Maros berpengaruh signifikan terhadap Belanja pembangunan daerah.
4. Pengelolaan Anggaran Pendapatan daerah Kabupaten Maros berpengaruh

dominanterhadap Belanja Infrastruktur daerah kabupaten Maros.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardja. (2014). "Pengelolaan Pendapatan & Belanja Daerah". Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. (2006). Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sembiring, Benar, Baik. (2009). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja (Studi Empris di Pemerintah Kabupaten Karo)". (<http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4032/1/09E01980.24> Oktober 2015).
- Hotman, Atiek. (2005). "Analisis Peranan Bappeda dalam Menyusun APBD Berdasarkan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Menuju Kepemerintahan yang Baik di Kabupaten Tulang Bawang Lampung".
- Hanum, Zulia. (2011). "Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai"
- Firman, A., & Kamaluddin, L. A. (2021). Benefits and confidence in the interest of e-banking. *Jurnal Economic Resource*, 4(1).
- Jandi, Ibnu. (2014). "Kajian atau Analisis Rasio Anggaran Pendapatan Daerah Pda APBD 2014 di 34 Provinsi dalam Wilayah NKRI" Kompasiana.com.
- Kartiwa. (2002). "Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Dan Arah Kebijakan Umum"
- Mirki, Vici, S. Tenda., Harijanto. Sabijono., dan Victorina, Z. Tirayoh. (2014). "Analisis Realisasi Anggaran Belanja (2010). "Manajemen Keuangan Daerah". Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. (2002). "Anggaran Sektor Publik". Andi. Yogyakarta. Marizka, Addina (2009).
- Nabila, Astriana. (2012). Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Manado
- Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Ram Ratulangi. T.A 2010 –". ISSN 2303- 1174 Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Manajemen". Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia. 2005.